

SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN RASIONALISASI TARIF WISATA PANTAI BERBASIS NILAI EKONOMI DI NEGERI HUKURILA, KOTA AMBON

**Adhitya Nugroho^{*1}, Angela Ruban², Eygner Gerald Talakua³,
Renoldy L Papilaya⁴, Janer Sangaji⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Pattimura, Ambon - Indonesia

*e-mail: adhtyanugroho@gmail.com

Abstract

This Community Service Program (PkM) activity was implemented in response to the challenges of sustainable beach tourism management in Hukurila Village, Ambon City, an area possessing significant natural resources and a high economic value (reaching Rp 120.7 Million/month). However, current management is suboptimal, characterized by excessively low tariffs and the weak institutional status of the Supervisory Community Group (POKMASWAS). Consequently, the PkM focused on Socialization of Institutional Capacity Building and Rationalization of Beach Tourism Tariffs based on Economic Value, utilizing Socialization and Focus Group Discussion (FGD) sessions. The PkM successfully achieved knowledge transfer and secured full commitment from managing partners to implement the proposed program, which emphasizes leveraging local marine and fishery potential and formalizing new policies through the establishment of Village Regulations (Peraturan Desa). This outcome directly fulfils the PkM's objective of strengthening local governance and ensuring that tariffs are set rationally, proportional to the area's economic value.

Keywords: *Capacity Building, Tariff Rationalization, Economic Value, Village Regulation, Marine Tourism.*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan wisata pantai berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon, yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan nilai ekonomi kawasan yang tinggi (mencapai Rp 120,7 Juta/bulan). Meskipun demikian, pengelolaan saat ini tidak optimal, ditandai dengan rendahnya tarif wisata yang tidak rasional dan lemahnya status kelembagaan POKMASWAS. Oleh karena itu, PkM ini berfokus pada Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Rasionalisasi Tarif Wisata Pantai Berbasis Nilai Ekonomi melalui mekanisme Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil PkM menunjukkan keberhasilan dalam transfer pengetahuan dan mencapai komitmen penuh dari mitra pengelola untuk mengimplementasikan program yang diusulkan, yang menekankan pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan, serta melegitimasi kebijakan baru tersebut dengan penetapan Peraturan Desa. Keberhasilan ini secara langsung memenuhi tujuan PkM dalam membangun tata kelola yang lebih kuat dan memastikan penetapan tarif yang sebanding dengan nilai ekonomi kawasan.

Kata kunci: *Peningkatan kapasitas, Rasionalisasi Tarif, Nilai Ekonomi, Peraturan Desa Wisata Bahari*

1. PENDAHULUAN

Negeri Hukurila, yang terletak di Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, diidentifikasi sebagai salah satu objek wisata pantai unggulan dengan potensi signifikan yang dapat menopang perekonomian lokal (Talakua *et al.* 2024). Kekuatan utama kawasan ini bersumber dari kekayaan sumber daya pesisir, perikanan, dan

kelautan, ditambah dengan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat (Sahetapy *et al.* 2021; Talakuan *et al.* 2024). Kombinasi antara keindahan alam dan modal sosial ini seharusnya menjadi fondasi utama untuk pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan dan mampu bersaing. Menurut Sahetapy *et al.* (2019) menyatakan bahwa pada terumbu karang di Negeri Hukurila terdiri atas 192 spesies ikan karang dari 78 genus dan 26 famili, terdiri atas 71 spesies target, 103 spesies major, 18 spesies indikator, dan dua spesies endemik, sedangkan status terumbu karang di Negeri Hukurila berada pada kriteria baik atau sehat. Indeks ekologi seperti terumbu karang, spesies ikan yang banyak ditemukan di perairan pesisir Negeri Hukurila dapat sebagai dasar perencanaan dan pengembangan wisata *diving* dan *snorkeling* (Sahetapy *et al.* 2021).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan wisata pantai di Negeri Hukurila saat ini masih menghadapi berbagai defisiensi yang mengancam keberlanjutan. Menurut Lelloltery *et al.* (2020) terdapat kekurangan berupa keterbatasan promosi, keterbatasan pengetahuan masyarakat, keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas pendukung. Kekurangan atau kelemahan pengelolaan menetapkan wisata di Negeri Hukurila pada urutan ke-4 dibawah Pantai Liang, Pantai Namalatu, dan Pantai Pintu Kota (Fakih, 2017). Menurut Talakua *et al.* (2024) Secara kelembagaan, status Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) juga masih lemah dilihat dari rendahnya jumlah kunjungan aktual maupun hasil ramalan kunjungan wisatawan per-hari dibandingkan daya dukung kawasan wisata. Tantangan ini diperparah dengan ancaman lingkungan berupa deplesi lebar pantai (abrasi) yang diperkirakan dapat mengurangi kesesuaian kawasan wisata pada tahun 2026. Padahal, studi valuasi menunjukkan kawasan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mencapai Rp 120.760.533 per bulan, menegaskan bahwa kegagalan dalam pengelolaan berkelanjutan akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Secara umum jika kawasan wisata tidak dikelola dengan baik untuk keberlanjutan maka akan mengakibatkan penurunan citra dan daya saing wisata (Alvi *et al.* 2018).

Mengingat adanya kesenjangan antara potensi ekonomi tinggi dan kondisi pengelolaan yang penuh masalah, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diinisiasi untuk memberikan rekomendasi solusi strategis. PkM ini secara spesifik menargetkan penyelesaian dua isu manajemen inti: peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan rasionalisasi tarif wisata. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mitra pengelola di Negeri Hukurila. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menumbuhkan komitmen mitra untuk mengadopsi program pengelolaan wisata pantai berkelanjutan yang ditawarkan, memanfaatkan secara sinergis potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta melegitimasi kebijakan pengelolaan baru tersebut melalui penerbitan peraturan desa setempat.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Pemilihan lokasi didasarkan pada identifikasi Negeri Hukurila sebagai kawasan wisata pantai unggulan yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan berkelanjutan. Mitra sasaran utama dalam kegiatan ini adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan aparat desa Negeri Hukurila, selaku pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan wisata pantai. Permasalahan yang menjadi fokus intervensi PkM telah teridentifikasi, yaitu: (1) rendahnya jumlah kunjungan wisatawan dan (2) penetapan tarif wisata yang sangat rendah, yang keduanya menghambat optimalisasi nilai ekonomi kawasan sebesar Rp 120.760.533/bulan.

Metode yang digunakan dalam PkM ini menurut (Talakua *et al.* (2024) adalah pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan dua tahapan utama: (1) Sosialisasi dan Penyampaian Materi. Tahapan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra mengenai data dan hasil analisis terkait nilai ekonomi kawasan, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, ancaman lingkungan, serta kesediaan membayar wisatawan (*Willingness To Pay/WTP*) untuk perlindungan pantai sebesar Rp 233.870,97/kunjungan). Materi sosialisasi ini menjadi dasar faktual untuk merumuskan kebijakan pengelolaan baru. (2) *Focus Group Discussion* (FGD), tahap ini merupakan inti dari kegiatan PkM, dirancang sebagai forum diskusi terpumpun dan interaktif. FGD bertujuan untuk memfasilitasi mitra dalam merumuskan dan menyepakati dua program solusi yang diusulkan oleh tim pelaksana. Diskusi diarahkan untuk mencapai konsensus mengenai mekanisme implemetasi program, serta mendorong komitmen mitra untuk melegitimasi hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk peraturan desa (perdes) guna menjamin keberlanjutan dan keberlanjutan kebijakan baru. Metode sosialisasi dalam kegiatan PkM merujuk pada metode FGD. Menurut Wahyuddin *et al.* (2023), FGD adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan sekelompok peserta untuk berdiskusi tentang topik tertentu dengan tujuan memperoleh pandangan dan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tersebut. Tahapan FGD tersebut adalah: persiapan FGD, desain FGD, pelaksanaan FGD, analisis data, dan pelaporan hasil. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi tema maupun sub tema pertanyaan menurut (Wahyuddin *et al.* 2023) yang nantinya akan diinterpretasikan menggunakan *coPntent analysis*.

3. HASIL DAN EMBAHASAN

Kegiatan PkM dalam bentuk sosialisasi dan FGD oleh dosen dan mahasiswa jurusan dan program studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pattimura (UNPATTI) yang dilakukan di aula kantor Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon (Gambar 1).



(a)



(b)

Gambar 1. Penyampaian materi oleh dosen (a) FGD bersama masyarakat (b).

Pada Gambar 1 foto pelaksanaan kegiatan PkM yang diisi oleh salah satu dosen Jurusan Agrobisnis Perikanan FPIK UNPATTI, kegiatan PkM ini dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari Raja Negeri Hukurila, Pemerintah Negeri Hukurila, anggota POKMASWAS, nelayan anggota BUMNeg Amanhuary. Inti kegiatan PkM dimulai dengan sosialisasi topik sesuai minat pada PS-AGP dan dilanjut dengan diskusi pertanyaan-pertanyaan oleh peserta yang kemudian diidentifikasi dalam tema/sub tema pertanyaan yang akan diinterpretasikan melalui *content analysis*. Wahyuddin *et al.* (2023), *content analysis* adalah teknik FGD yang dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan sub-tema yang muncul selama diskusi. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih tentang topik sosialisasi. Keberhasilan PkM diukur melalui dua indikator utama: (1) Peningkatan pengetahuan mitra terhadap topik sosialisasi dan hasil studi valuasi ekonomi. (2) pencapaian komitmen formal dari mitra POKMASWAS dan aparat desa untuk mengadopsi dan mengimplementasikan dua program solusi yang ditawarkan, yang membuktikan dengan kesepakatan untuk menerbitkan peraturan desa sebagai dasar hukum pengelolaan baru



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Gambar 2. Penyampaian Petanyaan Dalam FGD Kegiatan PkM

Tema/sub tema pertanyaan dalam FGD dirangkum sebagai berikut:

- a) POKMASWAS Tihulesy kesulitan melakukan pelarangan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan di Negeri Hukurila oleh masyarakat luar (Gambar 2a)

- b) Bentuk pelanggaran harus tertuang dalam peraturan negeri, untuk itu peraturan negeri harus dibuat oleh Pemerintah Negeri Hukurila (Gambar 4b)
- c) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Negeri Hukurila harus melibatkan *kewang* (lembaga adat) (Gambar 4c)
- d) Efektivitas alat tangkap bubu dalam peningkatan pendapatan nelayan di Negeri Hukurila (Gambar 4d)
- e) Harus ada kerjasama antara FPIK UNPATTI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon untuk lebih lagi meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Negeri Hukurila untuk menunjang kegiatan usaha wisata pantai (Gambar 4e)

Secara keseluruhan dari FGD muncul pertanyaan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki dampak, yakni sebelum kegiatan sosialisasi peserta belum mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata pantai di Negeri Hukurila, namun setelah kegiatan sosialisasi peserta mengetahui bahwa jumlah dan tarif kunjungan wisatawan harus ditingkatkan, dan peranan *kewang* dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangatlah penting di Negeri Hukurila, hal ini diutarakan langsung oleh salah satu peserta dalam kegiatan FGD. Dua program penting yang diusulkan untuk ditetapkan seperti program peningkatan jumlah wisatawan tiap tahun, peningkatan tarif wisata secara bertahap.

Hasil Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Mitra

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diawali dengan sosialisasi komprehensif kepada mitra utama, yang terdiri dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan perangkat desa Negeri Hukurila. Sosialisasi berfokus pada penyampaian data faktual yang dihasilkan dari studi sebelumnya, meliputi: (1) Nilai Ekonomi Total (NET) kawasan wisata yang mencapai Rp 120.760.533 per bulan, (2) data Kesiediaan Membayar (WTP) wisatawan untuk perlindungan pantai sebesar Rp 233.870,97 per kunjungan, dan (3) analisis mendalam mengenai ancaman deplesi lebar pantai (abrasi) serta rendahnya status kelembagaan POKMASWAS. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra memahami dengan baik topik yang disosialisasikan. Pemahaman ini penting karena merupakan prasyarat fundamental untuk transisi dari pengelolaan tradisional menuju manajemen wisata berkelanjutan. Kesadaran akan tingginya nilai ekonomi yang berpotensi hilang (*opportunity cost*) jika pengelolaan tetap stagnan menjadi katalisator utama untuk penerimaan solusi yang ditawarkan.

Kesepakatan Implementasi Program Solusi Manajemen

Tahap inti dari PkM, yaitu FGD, berfokus pada penyelesaian dua permasalahan manajemen yang paling kritis: kurangnya jumlah kunjungan wisatawan dan rendahnya tarif wisata yang tidak mencerminkan nilai kawasan. Tim pelaksana mengajukan dua program solusi yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan lokal (misalnya, pengembangan produk homestay atau paket wisata berbasis kuliner laut) untuk meningkatkan daya tarik. Hasil FGD mencapai konsensus mutlak: mitra menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan dua program yang ditawarkan. Kesepakatan ini mencerminkan penerimaan terhadap perlunya rasionalisasi tarif dan peningkatan kualitas/kuantitas produk wisata. Komitmen mitra ini menjadi hasil keberhasilan terbesar PkM, karena mengindikasikan adanya kemauan politik dan sosial di tingkat lokal untuk melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan.

Diskusi: Implikasi Nilai Ekonomi Terhadap Pengelolaan Berkelanjutan

Tingginya nilai ekonomi kawasan sebesar Rp 120,7 Juta per bulan menegaskan bahwa pariwisata pantai Hukurila harus dikelola sebagai aset ekonomi penting, bukan sekadar komoditas rekreasi. Kesenjangan antara nilai ini dan tarif wisata yang sangat rendah (yang berimplikasi pada minimnya dana konservasi) merupakan manifestasi kegagalan pasar. Komitmen mitra untuk menaikkan tarif, didukung oleh data WTP wisatawan (Rp 233.870,97/kunjungan), menjadi langkah strategis untuk: (1) Internalisasi Biaya Eksternal, yaitu mengalokasikan dana hasil retribusi untuk kegiatan perlindungan dan perbaikan jasa lingkungan (mitigasi abrasi), dan (2) Optimalisasi Pendapatan Lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model *pro-poor tourism*. Implementasi rasionalisasi tarif dan peningkatan produk wisata selaras dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang diamanatkan oleh (*United Nations World Tourism Organization*) UNWTO, yaitu integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penguatan Kelembagaan Melalui Regulasi Desa

Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah rendahnya status kelembagaan POKMASWAS, yang memengaruhi legitimasi mereka dalam menegakkan aturan. Dalam konteks ini, hasil FGD menunjukkan langkah maju yang signifikan: kesepakatan untuk mendukung program baru dengan peraturan desa (Perdes). Adopsi Perdes memiliki peran ganda: pertama, secara formal melegitimasi model pengelolaan baru, termasuk kenaikan tarif dan pengembangan produk yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan; kedua, memperkuat otoritas kelembagaan POKMASWAS dan aparat desa dalam melakukan pengawasan dan penegakan kebijakan, sehingga menjamin keberlanjutan program jangka panjang. Langkah institusionalisasi ini merupakan prasyarat esensial dalam penguatan tata kelola sumber daya, memastikan bahwa perubahan kebijakan yang disepakati tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mengikat secara hukum di tingkat lokal.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Negeri Hukurila dirancang sebagai intervensi strategis untuk mengatasi disparitas antara nilai ekonomi kawasan yang tinggi dan lemahnya manajemen implementatif. Secara spesifik, PkM berfokus pada dua kendala utama, yaitu penguatan kelembagaan dan inovasi produk wisata. Penguatan kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah krusial, sebab pengawasan berbasis masyarakat merupakan prasyarat untuk keberlanjutan sumber daya kelautan (Hehanussa *et al.* 2023) dan membutuhkan dukungan regulasi yang mengikat, yang kemudian diwujudkan melalui kesepakatan Peraturan Desa. Di sisi lain, untuk menyelesaikan masalah rendahnya tarif dan produk wisata, PkM menawarkan program diversifikasi dengan mengadopsi model pemanfaatan hasil perikanan sebagai peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir (Kaya dan Nurliah, 2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya konservasi ekosistem pesisir (Wawo *et al.* 2024) dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam menjaga kualitas dan daya saing pariwisata bahari Hukurila.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berhasil menyelesaikan masalah mendasar dalam pengelolaan wisata pantai Negeri Hukurila melalui intervensi kelembagaan dan ekonomi. Keberhasilan ini ditandai dengan tercapainya komitmen penuh dari mitra pengelola untuk mengadopsi solusi strategis PkM, yaitu rasionalisasi tarif wisata dan pengembangan produk yang memanfaatkan potensi

sumber daya kelautan dan perikanan secara sinergis. Komitmen ini diperkuat melalui langkah legalisasi yang krusial, yakni persetujuan untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes), yang secara definitif melegitimasi kebijakan pengelolaan baru. Dengan demikian, PkM tidak hanya berhasil dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga berhasil menginisiasi penguatan kelembagaan dan dasar hukum yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan optimalisasi manfaat ekonomi kawasan bagi masyarakat Negeri Hukurila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, N. N., Nurhasanah, I. S., & Persada C. (2018). Evaluasi Keberlanjutan Wisata Bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Plano Madani*, 7(1): 59-68.
- Fakih, M. F., Yuniaro, E. M., dan Susiki, S. M. N. (2017). Analisa Pola Kunjungan Wisatawan ke Berbagai Objek Daya Tarik Wisata di Pulau Ambon Menggunakan Frequent Pattern Growth. *KINETIK*, 2(3): 189-196. DOI:
- Hedanussa, K. G., Haruna., Hutubessy, B. G., Matrutty, D. D. P., Paillin, J. B. (2023). Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramaj Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut. *Balobe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2): 53-59.
- Kaya, I. R. G., Nurliah. (2023). Pelatihan Pembuatan Kecap Ikan Sebagai Peluang Usaha Bagi Masyarakat Pesisir Pantai Payum. *Balobe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2): 1-7.
- Lelloltery, H., Hitipeuw, J. C., dan Shureka, M. (2020). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(1): 23-35.
- Matrutty, D. D. P., Uneputty, P. A., Syauta, F., Waileruny, W. (2024). Penguatan Kapasitas Nelayan Perikanan Skala Kecil Tentang Log Book dan Konservasi. *Balobe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1): 1-8.
- Sahetapy, D., Selanno, D. A. J., dan Tuhumury, N. C. (2019). Potensi Ikan Karang di Perairan Pesisir Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. *Jurnal Triton*, 15(2): 46-57.
- Sahetapy, D., Siahainenina, L., Selanno, D. A. J., Tetelepta, J. M. S., dan Tuhumury, N. C. (2021). Status Terumbu Karang di Perairan Pesisir Negeri Hukurila. *Jurnal Triton*, 17(1): 35-45.
- Talakua, E. G., Ruban, A., & Papilaya, R. L. (2024). Kesiediaan Membayar Wisatawan Untuk Pelestarian Pantai di Desa Hukurila Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(4), 878-886.
- Wahyuddin, S., Heryana, N., Yusmah., Zulkarnaini., Sulistiyani., Atichasari, A. S., Simarmata, N., Triwijayanti, A., & Asroni, A. (2023). Metode Riset Kualitatif. Penerbit Get Press Indonesia. Padang
- Wawo, M., Mamesah, J. A. B., Siahainenina, L., Ayal, F. W., Siahaya, E. E. M. (2024). Pengelolaan Ekosistem Lamun Dalam Mendukung Keberlanjutan Dugong. *Balobe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1): 75-82.